



## Rivalitas Tiongkok dan Jepang di Asia Tenggara

Oleh

**Adelia Rahmawati**

Hubungan Internasional, Universitas Indonesia  
adeliarhm@gmail.com

### Pendahuluan

Sebagai dua kekuatan ekonomi yang paling menjanjikan di Asia Timur, hubungan antara Jepang dan Tiongkok telah menjadi salah satu isu yang paling disorot dalam hubungan internasional kontemporer. Di satu sisi, beragam kerangka kerja sama yang melibatkan salah satu atau kedua negara tersebut dapat menjadi peluang besar negara-negara di sekitarnya untuk mendapatkan investasi, membangun infrastruktur, meningkatkan volume perdagangan, dan mempercepat pembangunan secara lebih luas.<sup>1</sup> Namun disisi lain, adanya ketegangan dalam hubungan kedua negara ini juga bisa menjadi sumber ancaman bagi negara-negara yang lebih kecil. Situasi ini menjadi sangat penting di kawasan Asia Tenggara, dimana kehadiran Jepang dan Tiongkok telah menjadi realita politik yang berpengaruh selama beberapa dekade terakhir. Misalnya, Jepang secara konsisten telah berupaya untuk meningkatkan perannya sebagai salah satu mitra utama dalam menggerakkan ekonomi Asia Tenggara yang telah dicita-citakan di masa depan melalui kerja sama politik, keamanan, dan ekonomi. Bahkan, Jepang dapat bersanding dengan Amerika Serikat sebagai mitra dagang terbesar ASEAN selama lima tahun hingga 2008.<sup>2</sup>

Di sisi lain, kekuatan dan inisiatif ekonomi selalu menjadi sarana utama bagi Tiongkok untuk meningkatkan pengaruh positifnya di negara-negara Asia Tenggara. Misalnya, melalui insentif keuangan jangka pendek, investasi asing, suku bunga pinjaman yang rendah, dan rendahnya tarif perdagangan. Dengan demikian, melalui pengamatan atas apa yang telah dilalui kawasan Asia Tenggara selama satu dekade terakhir, terlihat jelas bahwa dua kekuatan yang berbeda sedang mencoba untuk meningkatkan pengaruh dan posisi mereka di arena bermain yang sama—atau “dua harimau berbagi gunung” seperti yang dijuluki Yahuda.<sup>3</sup>



Namun, terdapat perdebatan yang berkembang tentang apakah dinamika di antara kedua negara tersebut akan bertahan atau apakah hubungan antara kedua negara dapat dikategorikan sebagai persaingan. Hal tersebut sebenarnya tergantung bagaimana perbandingan kekuatan antara Jepang dan Tiongkok dipersepsikan. Misalnya, terlepas dari kesan pertama yang diberikan Jepang sebagai penyeimbang Tiongkok di Asia Tenggara, bisa jadi anggapan yang melihat Jepang mampu menyeimbangi pertumbuhan Tiongkok sebenarnya adalah sebuah hal yang keliru.<sup>4</sup> Dalam hal ini, jika Jepang tidak memiliki kecepatan pertumbuhan seperti Tiongkok, hubungan mereka bahkan tidak bisa dikategorikan sebagai rivalitas. Sebagai contoh, posisi teratas Jepang sebagai mitra dagang kawasan telah tergeser oleh pertumbuhan ekonomi Tiongkok sejak tahun 2009—yang mana meningkat tiga kali lipat pada tahun 2021.<sup>5</sup> Lebih buruk lagi, Jepang dianggap hanya sebagai salah satu sekutu Amerika Serikat, seperti Korea Selatan, untuk menyeimbangkan pengaruh dan dominasi Tiongkok. Meskipun begitu, literatur yang berkembang saat ini mengenai dinamika hubungan antara Tiongkok dan Jepang hampir selalu melihat Jepang sebagai pesaing utama Tiongkok di Asia Tenggara—atau seringkali juga dijuluki sebagai *Sino-Japanese Rivalry*. Hal tersebut karena terlepas dari posisi Tiongkok sebagai mitra dagang terbesar negara-negara ASEAN, Jepang sebenarnya adalah investor terbesar nomor dua setelah Amerika Serikat.<sup>6</sup> Di antara negara-negara lain di Asia-Pasifik, Jepang bahkan mampu berperan sebagai salah satu pihak yang dapat mengambil sikap terhadap Tiongkok dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan melalui kebijakan, tindakan, dan posisinya.<sup>7</sup>

Berdasarkan perdebatan yang telah dijabarkan sebelumnya, penulis melihat bahwa topik mengenai proyeksi dari rivalitas Jepang-Tiongkok di Asia Tenggara ke depannya masih kurang diperhatikan. Selain mengenai potensi atau risiko rivalitas di kawasan Asia Tenggara, seharusnya juga muncul pertanyaan apakah rivalitas tersebut bisa diakhiri atau tidak. Dengan mempertimbangkan pertanyaan ini, tulisan ini berpendapat bahwa persaingan tidak dapat dicegah atau dihindari, terlepas dari potensi risiko yang mungkin menyertainya. Selain itu, terdapat dua faktor, yaitu variabel domestik kedua negara dan kecenderungan negara-negara ASEAN untuk melakukan lindung nilai (*hedging*) di tengah ketidakpastian yang secara konstan mendorong terjadinya persaingan tersebut. Dalam menguraikan argumen utama, tulisan ini akan dibagi menjadi tiga bagian besar yang terdiri dari pendahuluan, analisis, dan simpulan.

## Dua Faktor yang Berkontribusi dalam Rivalitas Tiongkok-Jepang

Argumen pertama mengapa persaingan ini tak terhindarkan bagi Jepang dan Tiongkok berkaitan erat dengan konteks domestik masing-masing negara yang dibentuk oleh latar belakang sejarah kedua





negara. Hal ini secara khusus mengacu pada bagaimana sejarah pembangunan bangsa Jepang dan Tiongkok menciptakan sentimen dan orientasi dalam memandang satu sama lain. Ketidakpercayaan tersebut kemudian berkembang karena adanya perjalanan politik masing-masing negara.

Untuk menjelaskan mengapa premis ini penting, sekiranya perlu untuk mengevaluasi isu yang ada melalui perspektif yang lebih umum. Tiongkok dan Jepang merupakan dua negara dengan tingkat ketergantungan dan hubungan ekonomi yang sangat tinggi. Pada tahun 2018, Tiongkok menjadi mitra dagang terbesar Jepang dan Jepang melampaui semua investor asing di Tiongkok dengan investasi hingga 101 miliar dolar antara tahun 1995 dan 2017.<sup>8</sup> Dalam logika liberal tradisional, persaingan atau konflik antara keduanya hampir tidak mungkin terjadi karena hal tersebut hanya akan merugikan ekonomi kedua negara tersebut. Sementara itu, dari logika realis, dengan *leverage* dan perbedaan kemampuan Tiongkok terhadap Jepang, Beijing seharusnya tidak menganggap hubungannya dengan Jepang sebagai sebuah persaingan yang signifikan. Namun, terlepas dari pertimbangan dan logika ini, persaingan Tiongkok-Jepang tidak dapat disangkal dan merupakan salah satu isu yang paling menonjol dalam konstelasi politik Asia Timur kontemporer. Dengan mempertimbangkan fakta ini, maka telah menjadi isyarat bagi penulis untuk mengamati dinamika dan variabel di tingkat bawah—tingkat domestik.

Tidak ada satu katapun yang dapat menggambarkan hubungan antara Tiongkok dan Jepang sepanjang sejarah selain fluktuasi. Hal tersebut dikarenakan adanya serangkaian proses sejarah yang panjang. Proses sejarah di antara kedua negara tersebut bahkan bisa dilacak hingga tiga ribu tahun ke belakang.<sup>9</sup> Namun, dari seluruh bagian sejarah tersebut, terdapat sebuah momen penting dimana ketidakpercayaan antara kedua negara (terutama dari Tiongkok ke Jepang) mulai mengakar, yaitu saat Perang Tiongkok-Jepang kedua tahun 1937. Saat itu Jepang menginvasi Tiongkok dan mengambil alih ibukota Nanking dengan melakukan kejahatan perang yang masif dan kejam. Pengadilan Militer Internasional untuk Timur Jauh atau Pengadilan Kejahatan Perang Nanking bahkan menyatakan bahwa korban tewas dari insiden tersebut melebihi 200.000 orang, sementara 20.000 lainnya menjadi sasaran kejahatan pemerkosaan.<sup>10</sup>

Yang lebih buruk lagi, Jepang seringkali tidak menganggap insiden tersebut sebagai suatu hal yang perlu disesali. Hal tersebut dilakukan dengan membuat 'mitos' yang mengemas tindakan perang Jepang sebagai sebuah hal yang heroik.<sup>11</sup> Pada tahun 2021, 77,5% responden Tiongkok melihat kegagalan untuk meminta maaf dan merefleksikan dengan benar sejarah agresi tersebut sebagai alasan yang sangat konkrit untuk menjelaskan pandangan negatif mereka terhadap Jepang.<sup>12</sup> Di sisi





lain, persepsi orang Jepang tentang Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir juga semakin memburuk dengan jumlah yang besar, yaitu sekitar 84,7%.<sup>13</sup> Namun, pandangan mereka yang kurang baik ini sebagian besar dimotivasi oleh alasan politik seperti Perang Dagang AS-Tiongkok dan kebijakan ekspansionis Tiongkok di luar negeri daripada aspek sejarah.

Selanjutnya, isu lain yang penting untuk disorot dalam konteks faktor domestik adalah sengketa Kepulauan Senkaku/Diayou yang sudah berlangsung selama hampir 70 tahun. Kepulauan Senkaku/Diayou sendiri adalah gugusan pulau tidak berpenghuni yang terletak sekitar 170 km barat laut Pulau Ishigaki Jepang/Perfektur Okinawa dan sekitar 330 km dari lepas pantai daratan Tiongkok.<sup>14</sup> Perebutan atas wilayah tersebut telah memicu banyak kemarahan dari masyarakat di kedua negara tersebut sepanjang zamannya—terutama ketika Jepang memutuskan untuk membeli pulau-pulau tersebut dari pemilik swasta dan menasionalisasikannya pada tahun 2012. Keputusan Jepang untuk menasionalisasikan kepulauan tersebut memicu gerakan nasional anti-Jepang skala besar di Tiongkok. Pemerintah Tiongkok kemudian mengeluarkan pernyataan resmi yang menyatakan kekecewaan mereka yang disusul dengan penerbitan buku putih berjudul '*Diayou Dao, an inherent territory of China.*' Sejak saat itu, Tiongkok kerap meningkatkan kehadirannya melalui pengiriman unit angkatan laut ke area di sekitar pulau tersebut.

Meskipun satu dekade telah berlalu, masalah sengketa maritim Senkaku/Diayou masih relevan dalam diskusi kontemporer tentang iklim domestik masing-masing negara. Survei publik yang dilakukan oleh salah satu *think tank* di Jepang, Genron NPO, pada tahun 2021 menunjukkan bahwa masalah ini masih menjadi salah satu pengaruh utama dari reputasi buruk Jepang di antara masyarakat Tiongkok.<sup>15</sup> Namun, persepsi yang kurang menyenangkan itu juga dirasakan oleh masyarakat Jepang karena mereka melihat kebijakan aktif Tiongkok untuk meningkatkan patroli dan kehadiran di wilayah tersebut sebagai bentuk pelanggaran kedaulatan mereka. Dengan demikian, hubungan antara keduanya tetap dipenuhi oleh rasa ketegangan dan ketidakpercayaan.

Sementara itu, alasan kedua mengapa persaingan antara Jepang dan Tiongkok di Asia Tenggara tidak terhindarkan adalah kecenderungan negara-negara anggota ASEAN untuk melakukan *hedging* dalam hubungannya dengan *great powers* di kawasan Asia-Pasifik. *Hedging* didefinisikan sebagai sebuah konsep dalam studi hubungan internasional yang menggambarkan keputusan aktor internasional untuk tidak menyeimbangkan atau ikut-ikutan. Artinya, negara tidak menghindari keberpihakan atau mengejar tindakan melawan kekuatan yang bersaing. Perilaku tersebut dijelaskan sebagai sikap mencari jaminan yang biasanya dikaitkan dalam situasi dengan risiko yang tinggi.<sup>16</sup>





Mempertimbangkan bagaimana geopolitik di Asia-Pasifik (terutama Asia Tenggara) yang didominasi oleh keberadaan negara adidaya serta kategori negara-negara Asia Tenggara yang merupakan kekuatan kecil atau kekuatan menengah.

Namun, dalam konteks persaingan Tiongkok-Jepang, kecenderungan seperti itu paling baik digambarkan sebagai siklus reproduksi daripada sebuah hubungan kausal linier. Artinya, semakin intens keterlibatan Jepang dan/atau Tiongkok di Asia Tenggara, maka akan semakin intens juga dinamika persaingan yang tercipta di antara keduanya hingga waktu yang tidak ditentukan. Maka dari itu, terlepas dari adanya motivasi yang kuat untuk meningkatkan keterlibatan internasional mereka dari tingkat domestik, Tiongkok dan Jepang juga tidak dapat mengambil pendekatan yang terlalu agresif untuk rekan-rekan mereka di Asia Tenggara. Jika salah satu kekuatan besar dianggap terlalu ikut campur dalam dinamika regional, negara-negara Asia Tenggara kemungkinan besar akan meningkatkan hubungan mereka dengan kekuatan besar lainnya untuk menjaga keseimbangan.<sup>17</sup> Dengan demikian, Jepang dan Tiongkok hanya akan mampu bersaing secara terbuka di Asia Tenggara. Artinya, peningkatan partisipasi dari satu pihak hanya akan mendorong perilaku *hedging* lebih lanjut. Inilah sebabnya mengapa hubungan persaingan antara Tiongkok-Jepang dan strategi *hedging* negara-negara Asia Tenggara akan lebih baik digambarkan sebagai *self-maintained cycle* daripada sebagai sebuah hubungan sebab-akibat linier.

## Simpulan

Dalam pembahasan geopolitik Asia, Tiongkok dan Jepang merupakan dua aktor yang paling signifikan hingga perlu mendapat perhatian. Namun, terlepas dari peluang besar yang dapat dimanfaatkan dari posisi mereka, hubungan antara keduanya yang dipenuhi ketegangan justru menjadi perih yang perlu diwaspadai. Gagasan ini sangat penting terutama bagi negara-negara Asia Tenggara sebab posisi geografis serta situasi politik negara-negara Asia Tenggara terhadap kedua negara tersebut. Namun demikian, terlepas dari perdebatan mengenai karakteristik, prospek, ataupun kemungkinan persaingan, hal tersebut tetap akan menjadi sebuah realita politik yang tidak terhindarkan dan harus diakui.

Keniscayaan tersebut didorong oleh dua faktor, yaitu variabel domestik serta kecenderungan negara-negara Asia Tenggara untuk melakukan *hedging* di tengah-tengah *great powers*. Pertama, variabel domestik mengacu pada sejarah dan proses sejarah pembangunan bangsa pada masing-masing negara yang melibatkan satu sama lain serta sengketa maritim yang sudah berlangsung sejak





# THC INSIGHTS

No. 36 / 08 September 2022  
[www.habibiecenter.or.id](http://www.habibiecenter.or.id)

lama. Kejahatan perang mengerikan yang dilakukan oleh Jepang masih meninggalkan bekas luka bagi sebagian besar orang Tiongkok, sementara sengketa maritim atas pulau Senkaku/Diayou terus mengobarkan api konflik dan ketidakpercayaan selama bertahun-tahun. Kedua, kecenderungan negara-negara Asia Tenggara untuk melakukan *hedging* juga mau tidak mau memaksa Tiongkok dan Jepang ke dalam skema persaingan dan keterlibatan yang mendalam di kawasan Asia Tenggara. Nantinya, pada titik tertentu, mungkin tidak ada pilihan lain bagi mereka selain untuk bekerja sama di hadapan negara-negara Asia Tenggara. Dengan mempertimbangkan kedua faktor tersebut, maka rivalitas antara Jepang dan Tiongkok akan menjadi sebuah peristiwa geopolitik yang masih akan kita saksikan hingga beberapa waktu ke depan.







## Endnotes

- 1 Mun, Tang Siew. "Sino-Japanese Relations and its Effects on Archipelagic Southeast Asia." Dalam *Policy Report: Impact of the Sino-Japanese Competitive Relationship on ASEAN As A Region and Institution*. Singapore: RSIS, 2014
- 2 Jibiki, Koya. "Japan's economic clout wanes in Southeast Asia." *Nikkei Asia*, (2022). Diakses melalui <https://asia.nikkei.com/Spotlight/Datawatch/Japan-s-economic-clout-wanes-in-Southeast-Asia>
- 3 Yahuda, Michael. *Sino-Japanese Relations after the Cold War: Two tigers Sharing a Mountain*. London, Routledge: 2013
- 4 Bland, Ben." RESOLVED 2020: Japan Is Well positioned to Counterbalance China in Southeast Asia." *Debating Japan*, Volume 3, Issue 5. (2020): 2-4
- 5 Jibiki, Koya., *Loc. Cit.*
- 6 *ASEAN Investment Report 2020-2021*. Jakarta: The ASEAN Secretariat, 2021.
- 7 De castro, Renato Cruz. "China and Japan in maritime Southeast Asia: Extending their geo-strategic rivalry by competing for friends." *Philippine Political Science Journal* 34(2), (2013):150-169. DOI: 10.1080/01154451.2013.851491
- 8 Hornung, Jeffrey and Kiyoyuk Seguch. '*Resolved: China-Japan Rapprochement Will Fail*', *Debating Japan*. Center for Strategic and International Studies, Vol. 1, Iss. 2. (2018)
- 9 Cheow, E. T. C. "Sino-Japanese Relations: Conflict Management & Resolution." *The Silk Road Paper*, (2006): 7-89
- 10 "Nanjing Massacre, Chinese history." *Britannica* (n.d.). Diakses melalui <https://www.britannica.com/event/Nanjing-Massacre>
- 11 He, Yinan. "The Past and Present of Sino-Japanese Relations: Revisiting the Roles of the US Factor and Historical Legacy and US Factor." In *The United States between China and Japan*. Cambridge Scholars Publishing, 2013 Kudo, Yasushi. "Why do the Japanese have negative views of China?" *The Genron NPO* (2019). Diakses melalui <https://www.genron-npo.net/en/issues/archives/5507.html>
- 12 "Poll Shows Rise to Over 60% of Chinese Viewing Japan Unfavorably." *Nippon.com* (2021). Diakses melalui <https://www.nippon.com/en/japan-data/h01154/>
- 13 Kudo, Yashusi. The 17th The Genron NPO Joint Public Opinion Poll: Japan-China Public Opinion Survey 2021. The Genron NPO, 2021
- 14 Grieger, Gisela. "Sino-Japanese controversy over the Senkaku/Diayou/Diayoutai Islands: An imminent flashpoint in the Indo-Pacific?" *European Parliament Briefing*. Brussels: European Parliamentary Research Service, 2021
- 15 Kudo, Yashusi. The 17th The Genron NPO Joint Public Opinion Poll: Japan-China Public Opinion Survey 2021. The Genron NPO, 2021
- 16 Kuik, Cheng-Chwee. "Getting hedging right: a small-state perspective." *China International Strategy Review*, No.3, (2021): 300-317
- 17 Kuik, Cheng-Chwee. "How Do Weaker States Hedge? Unpacking ASEAN states' alignment behavior towards China." *Journal of Contemporary China*, (2016): 1-15





# THC INSIGHTS

**THC Insights** are timely and policy-relevant analysis of current political, economic and socio-cultural issues affecting Indonesia and the region. The expert observations and recommendations are produced by contributors at The Habibie Center. Disclaimer: The opinions expressed in this article are those of the author and do not necessarily represent those of The Habibie Center.

The **Habibie Center** was founded by Bacharuddin Jusuf Habibie and family in 1999 as an independent, non-government, non-profit organisation. The vision of The Habibie Center is to create a structurally democratic society founded on the morality and integrity of cultural and religious values. The mission of The Habibie Center are first, to establish a structurally and culturally democratic society that recognizes, respects, and promotes human rights by undertaking study and advocacy of issues related to democratization and human rights, and second, to increase the effectiveness of the management of human resources and the spread of technology.

**Contact:**

The Habibie Center

Jl. Kemang Selatan No. 98, Jakarta 12560

Tel: +62 21 781 7211 | Fax: +62 21 781 7212

Email: [thc@habibiecenter.or.id](mailto:thc@habibiecenter.or.id)

Website: [www.habibiecenter.or.id](http://www.habibiecenter.or.id)